

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah dokumen pertanggung jawaban dan informasi yang berisi tentang penerimaan dan penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat maupun pemerintah pusat yang terdiri dari Laporan Realisasi, Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan, yang disajikan oleh pemerintah (Ngguna, 2017). Dalam pemberian opini terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah (LKPD) terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pernyataan profesional pemeriksaan atas opini kewajaran informasi keuangan yang disusun dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah
2. Kecukupan pengungkapan (*adiquate disclosure*)
3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan , dan
4. Efektifitas sistem pengendalian internal

Penyajian laporan keuangan tentunya tidak luput dari peran kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang kompeten serta harus memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Menurut Enny (2016) meyakini bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu kemampuan untuk menjalankan sistem-sistem yang telah ditetapkan dan untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. karena SDM merupakan unsur terpenting dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya kompetensi dasar SDM dapat menjadi tolak ukur bahwa sumber daya manusia yang bersangkutan memiliki kinerja yang tinggi dengan tanggung jawab dalam pekerjaannya seperti merencanakan, melaksanakan, dan dapat mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati dkk,2014).

Hubungan teoritis tentang kompetensi sumber daya manusia didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, mengingat bahwa sumber daya manusia merupakan tameng utama dalam penyusunan laporan keuangan serta penggerak sistem-sistem yang telah ditetapkan, untuk itu kapasitas sumber daya manusia perlu diperhatikan. Maka kompetensi SDM di pemerintahan yang digunakan harus berkompeten dan didukung oleh latar belakang pendidikan dalam bidang akuntansi, sering ikut serta dalam pelatihan, memiliki pengalaman dalam bidang keuangan, dan apabila SDM tidak memahami logika akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, maka akan berdampak terhadap *output* produk laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penjelasan tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Kiranayanti (2016), Yadnya (2017), Wandura (2017), dan Daswiran (2017) yang mengemukakan dalam hasil risetnya bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil riset tersebut membantah Fikri (2016), dan Siwambudi (2017) yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Suatu informasi laporan keuangan yang kurang berkualitas seperti laporan keuangan dengan hasil opini WDP secara tidak langsung memberikan ruang atau kesempatan dalam hal penyimpangan serta kekeliruan dalam bidang keuangan, penyimpangan yang akan terjadi seperti kecurangan, korupsi, kolusi yang akan menciptakan tuntutan Hukum. Apabila kondisi seperti itu terjadi secara berulang-ulang selain itu dampak terhadap masyarakat yang akan menanggung seperti biaya transaksi yang tinggi dan pelayanan publik yang kurang maksimal (buruk), serta berkurangnya kepercayaan masyarakat, kreditor, investor lokal maupun internasional yang akan memberikan bantuan dana terhadap pemerintahan. Untuk itu diharapkan pemerintah meningkatkan kualitas dan informasi kualitas laporan keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang 60 Tahun 2008 menjelaskan tentang pengendalian internal dimana suatu aktifitas integral yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pimpinan

dan pegawai yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang tepat atas tercapainya suatu tujuan organisasi melalui program yang telah dijalankan secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Walaupun pengendalian internal merupakan sebuah proses yang penting dalam penyajian laporan keuangan tidak menuntut kemungkinan sistem pengendalian internal memiliki kelemahan. Menurut Mahmudi (2018) terdapat tiga kelemahan terhadap Sistem Pengendalian Intern: 1). Kelemahan sistem terhadap pengendalian akuntansi dan pelaporan itu artinya sesuatu kelemahan yang terjadi pada aktivitas pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan, 2). Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja yang artinya pengendalian yang terjadi pada aktivitas pemungutan, dan penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan, milik negara/daerah dan pelaksanaan program terhadap entitas yang diperiksa, 3). Kelemahan terhadap pengendalian intern yang artinya suatu kelemahan yang berkaitan dengan ada atau tidaknya suatu struktur pengendalian intern atau efektifitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang akan diperiksa. Selain kelemahan terdapat faktor-faktor didalam lingkungan pengendalian intern.

Menurut BPKP (2008:5) aktifitas yang terjadi dalam pengendalian meliputi langkah-langkah dalam mengatasi resiko yang kemungkinan akan terjadi serta kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin dan memastikan bahwa resiko yang terjadi telah dikendalikan dengan efektif. Kebijakan merupakan aturan apa yang harus dilakukan menjadi tolak ukur dan dasar dalam penyusunan prosedur. Sifat pengendalian merupakan kegiatan yang mencakup pengungkapan secara detektif dan preventif. Dari pemeriksaan tersebut apabila terdapat kegagalan dan penyimpangan maka perlu tindakan pengoreksian kembali terhadap entitas yang bersangkutan untuk penyempurnaan kegiatan pengendalian.

Bastian (2011) menyatakan auditor akan mengeluarkan opini wajar tanpa pengucualian (WTP) terhadap suatu laporan keuangan jika, dalam penyusunan laporan keuangan telah mengikuti pedoman standar auditing, sehingga tidak terjadi dimana terdapat suatu kondisi tertentu yang membutuhkan keterangan kalimat penjelasan. Untuk itu perlunya suatu sistem

dimana sistem yang digunakan dapat membantu pemerintahan lebih mudah dalam memantau suatu laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan memiliki kualitas yang baik. Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) yang dijelaskan dalam PP No. 71 tahun 2010 merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan guna untuk penyusunan atas laporan keuangan. Dengan demikian laporan keuangan yang disajikan menjelaskan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan dalam menjalankan pembangunan sehingga terciptannya *good governance* dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Dalam keberhasilan suatu kinerja dari SDM terdapat dukungan dan arahan dari pimpinan yang dapat mempengaruhi, membimbing, serta mengarahkan tingkah laku orang lain demi mencapai visi dan misi dari entitas tersebut (Fitri, 2013, dalam Dharma (1994:114). Gaya kepemimpinan digolongkan menjadi dua kategori yang pertama, struktur inisiatif (*Initiating struktur*) artinya bentuk gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan. Yang kedua, gaya kepemimpinan yang bersifat pertimbangan (*consideration*) jenis gaya kepemimpinan ini menjelaskan bagaimana hubungan antara atasan dengan bawahan yang saling mempercayai dan saling mendukung demi terlaksananya komunikasi yang baik (Fitri, 2013), dalam De Coster (1986). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu entitas akan dikatakan berhasil apabila setiap individu yang terdapat didalamnya sejalan dan saling melengkapi demi tercapainya visi dan misi organisasi, Dan dapat menanamkan rasa tanggung jawab yang besar karena merasa harus memberikan yang terbaik bagi organisasinya dan serta merasa ikut memiliki organisasinya. Begitupun sebaliknya jika memiliki komitmen yang rendah maka setiap individu lebih mementingkan urusan pribadi dari pada loyalitas terhadap organisasinya, secara tidak sadar akan berdampak sulit untuk menyatukan pemikiran sehingga visi dan misi organisasi tidak tercapai.

Berbicara tentang Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Kabupaten Sampang merupakan satu-satunya kabupaten yang sepanjang sejarah opini laporan keuangan selalu WDP diantara tiga kabupaten yang ada di Madura. Sampang terletak ditengah-tengah antara

Kabupaten Bangkalan dengan Kabupaten Pamekasan , menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sampang luas wilayah sekita 1233,33 km² dan jumlah penduduk sebanyak 117.509, dengan ketinggian 7,001 diatas permukaan air, yang habis dibagi menjadi 14 Kecamatan yaitu Sreseh, Torjun, Pengarengan, Sampang, Camplong, Omben, Kadungdung, Jrengik, Tambelangan, Banyuates, Robatal, Karang Penang, Ketapang, Sokobenah. Serta terdapat 23 (dua puluh tiga) kantor dinas atau SKPD yang ada di Kabupaten Sampang.

Kabupaten Sampang adalah Salah satu Kabupaten yang diberi wewenang oleh pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangga sendiri. Seperti halnya dalam penyusunan laporan keuangan, hasil pemeriksaan audit terhadap LKPD kabupaten Sampang dari tahun ketahun selalu mendapatkan opini WDP, jika dibandingkan dengan LKPD tiga Kabupaten yang ada di Madura Kabupaten Sampang paling konsisten dalam mendapatkan opini WDP, tetapi pada tahun terahir Sampang mengalami peningkatan dalam penyusunan laporan keuangan dengan dibuktikan opini yang didapatkan Kabupaten sampang. Berikut daftar opini LKPD Kabupaten se Madura tahun 2014 s.d 2018:

Tabel 1.1

. Daftar opini (Kabupaten/Kota se-Madura) periode 2014 s.d 2018

No.	Kabupaten	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Bangkalan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
2.	Sampang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
3.	Pamekasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Sumenep	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber:<http://surabaya.bpk.go.id>

Dapat dilihat pada tabel diatas daftar opini laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten se-Madura, dari laporan keuangan yang konsisten mendapatkan opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari tahun ketahun diterima oleh Kabupaten Pamekasan. Sedangkan Kabupaten yang hampir konsisten dari tahun ketahun mendapatkan opini Wajar dengan pengecualian (WDP) diterima oleh Kabuapten Sampang, hanya saja terdapat

kemajuan untuk Kabupaten Sampang opini yang didapatkan pada tahun terakhir yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu artinya sedikit banyaknya pencapaian yang didapatkan tidak luput dari peran SDM serta pengaruh dari pemimpin daerah/ Bupati.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tentang laporan keuangan masih kurang kuat terdapat perbedaan pendapat hasil penelitian pada variabel yang secara kebutuhan itu sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan, seperti dalam penelitian menurut Magfiroh (2015) dan Kiranayanti (2016) SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Fikri, (2016) dan Siwambudi, (2017) yang menyatakan bahwa SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar signifikansi dari setiap variabel sehingga peneliti menarik kesimpulan untuk meneliti “ Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Sampang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat mendefinisikan masalah-masalah yang terjadi dengan membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas keuangan pemerintah di Kabupaten Sampang?
4. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, sehingga peneliti memiliki tujuan untuk menjawab dari beberapa masalah yang telah ditetapkan diatas:

1. Untuk menguji pengaruh Kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Sampang
2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan
3. Untuk menguji pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas keuangan pemerintah di Kabupaten Sampang
4. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memperbaiki sistem atau pemahaman terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan
3. Memberikan informasi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan
4. Menjadi referensi terhadap peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah .